

Redupnya Cahaya Tuan Guru: Dekharismatisasi Sosok Tuan Guru Terlibat Dalam Politik

Wahyu Trisno Aji¹, Fauzul Kabir²

¹ *Interdisciplinary Islamic Studies*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Surat-e: wahyutrisnoaji@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to explain how Tuan Guru is Decharismatized when involved in politics. In the Sasak tribe on the island of Lombok, West Nusa Tenggara (NTB) province, the figure of Tuan Guru is seen as a religious figure or cleric whose main purpose of existence is none other than to continue the baton of preaching from the Prophet Muhammad SAW. The figure of Tuan Guru in Lombok is none other than an important figure who guides society more specifically in the order of life according to religious teachings. However, the view of the Lombok community towards Tuan Guru with charisma gradually faded when Tuan Guru was involved in the world of politics, namely a world where uncertainty and power are the main heart. From the results of Agus Dedy Putrawan's research (2014) that the Sasak community sees that when Tuan Guru is involved in politics, it has the potential to move away from the main role as a preacher, then many other factors cause the figure of Tuan Guru to experience Decharismatization when this religious figure is involved in politics.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana Dekharismatisasi Tuan Guru ketika terlibat dalam politik. Dalam masyarakat suku Sasak di pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sosok Tuan Guru dilihat sebagai seorang tokoh agamawan atau ulama yang tujuan utama mereka eksis tak lain untuk melanjutkan estafet dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Sosok Tuan Guru di Lombok tidak lain sebagai sosok penting pemandu masyarakat secara lebih khusus dalam tatanan kehidupan sesuai ajaran agama. Namun pandangan masyarakat Lombok terhadap Tuan Guru dengan kharismatik lama kelamaan memudar disaat Tuan Guru terlibat dalam dunia politik, yakni dunia dimana ketidakpastian dan kekuasaan menjadi jantung utama. Dari hasil penelitian Agus Dedy Putrawan (2014) bahwa Masyarakat Sasak melihat ketika Tuan Guru terlibat dalam politik akan berpotensi menjauh dari peran utama sebagai pendakwah, kemudian banyak faktor-faktor lainnya yang menyebabkan sosok Tuan Guru mengalami Dekharismatisasi ketika sosok agamawan ini terlibat dalam politik.

KEYWORDS:

Decharismatization; Politics; Tuan Guru.

KATA KUNCI:

Dekharismatisasi; Politik; Tuan Guru

How to Cite:

“Aji, W. T., Kabir, F. (2024). Redupnya Cahaya Tuan Guru: Dekharismatisasi Sosok Tuan Guru Terlibat Dalam Politik. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(6), 168–178.”

PENDAHULUAN

Ulama menjadi salah satu nama tokoh agamawan yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia (Hamid et al, 2024), secara khususnya dalam peran nya mengarahkan kehidupan beragama dan bermoral sesuai pedoman keagamaan (Huda, 2021). Eksistensi Ulama tak lain dari pewaris nabi yang bertugas

menyampaikan pesan-pesan kepada umat untuk memahami eksistensi manusia sebagai seorang khalifah, sekaligus seorang makhluk ciptaan yang hidup, berfikir, dan beribadah hanya kepada Allah SWT (Riska, 2022). Sehingga estafet dakwah Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh seorang ulama, dalam hal ini tokoh ini secara khusus akan dapat mengembangkan peran utama di bumi ini sebagai *tabligh*, *tabyin*, *tahkim* dan *uswah* kepada umat manusia (Pascal, 2021).

Ulama tersebar luas seluruh daerah di Indonesia (Wulandari & Hudaidah, 2021), termasuk salah satu daerah bernama Pulau *Lombok*. Yakni sebuah pulau sering disebut sebagai bagian dari Nusa Tenggara yang terpisah dari Bali dan merupakan bagian dari daerah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan total jumlah penduduk Tahun 2023 sekitar 3.936.194 jiwa dengan luas pulau mencapai 5.435 km² (Nasution et al, 2023). Mayoritas masyarakat *Lombok* beragama Islam (Acil & Rahmah, 2023), salah satu nama penyebutan Ulama secara luas di *Lombok* adalah *Tuan Guru* (Fahrurrozi, 2023). Secara pemahaman sederhana, *Tuan Guru* sama halnya dengan sebutan *kyai* di pulau Jawa, dimana sebutan itu merujuk kepada identitas ulama yang bertugas menyampaikan dakwah-dakwah keislaman (Muhtador et al, 2023). Sebutan *Tuan Guru* sendiri di pulau *Lombok*, memiliki banyak pandangan (Riswanda, 2022).

Setidaknya, Putrawan (2014) memaparkan ada beberapa hal mengapa seseorang disebut sebagai *Tuan Guru*, diantaranya pertama sebutan *Tuan Guru* memang menjadi bentuk bagian genealogis atau warisan dari tokoh agamawan di pulau *Lombok*, sehingga dalam pandangan ini seorang menjadi *Tuan Guru* karena memang warisan dari keluarga (Rahman, 2023). Kemudian adapun pandangan lain menjelaskan sebutan *Tuan Guru* adalah diberikan kepada mereka yang pernah belajar di luar negeri, kemudian kembali ke *Lombok* mengajarkan ilmu agama. Adapun ada pandangan yang mirip juga, sekaligus bentuk kelonggaran dengan memberikan kriteria *Tuan Guru* karena luasnya ilmu pengetahuan, sebagai orang-orang berakhlak, memiliki pengikut dan memiliki kemampuan membaca kitab kuning.

Pada intinya, *Tuan Guru* di *Lombok* merupakan tokoh agamawan yang dijadikan pedoman guru dalam mempelajari ilmu agama, dan bahkan seringkali menjadi penengah, dan pemberi nasehat dalam kehidupan keseharian masyarakat di *Lombok* (Putrawan, 2014). Namun seiring berkembangnya zaman, terkhusus masuk era reformasi dimana pada era ini ruang demokratisasi terbuka lebar. Kebebasan berpolitik dan menjadi aktor politik terbuka lebar, secara khusus dalam satu fenomena nyata dimana saat itu Gus Dur yakni seorang tokoh agamawan yang memiliki background keagamaan Islam menjadi presiden Republik Indonesia ke-4. Pada fase inilah, Dobrakan ruang kebebasan dari berbagai kalangan di daerah-daerah Indonesia secara khususnya mengalir. Para tokoh agamawan mulai memiliki kesempatan untuk hadir dalam kontestasi politik sebagai bentuk keterbukaan partisipasi politik berdasarkan asas-asas Pancasila dengan sistem pemerintahan demokrasi (Rahman, 2023). Pandangan juga berlanjut di *Lombok* tentunya, dimana kehadiran *Tuan Guru* pada masa era reformasi hingga saat ini bukan sekedar hanya menyampaikan ajaran ke-Islaman saja, sebagaimana masa muasal kemunculannya. Namun, mereka melibatkan diri sebagai dalam dunia politik untuk tujuan tertentu, yang pada dasarnya mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam kepemimpinan berdasarkan ajaran Islam yang coba mereka terapkan, sebagaimana cara Nabi menjadi seorang pemimpin, sekaligus mentaati aturan di Indonesia yang berlaku (Rahman, 2023).

Dalam konteks hari ini, kehadiran *Tuan Guru* tidak hanya duduk dalam peran keagamaan, tidak sekedar hanya memiliki ruang keterlibatan mengurus persoalan ketentuan kehidupan sejauh aturan Islam secara Fiqih, Hadist dan Al-Quran secara teoritis seperti dilakukan pengajian (Aji, 2024), maupun dalam kegiatan pengajaran pendidikan di pondok pesantren. Namun hari ini, disaksikan bagaimana banyak *Tuan Guru* terlibat dalam politik. Sebagaimana oleh Fazlurrahman (2023) menerangkan banyaknya tokoh-tokoh agamawan di *Lombok* terlibat dalam dunia politik, seperti Pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004, sejumlah *Tuan Guru* turut berperan aktif sebagai calon legislatif di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga nasional, mencerminkan peran mereka yang signifikan dalam kancah politik. Di tingkat DPRD Kabupaten *Lombok Timur*, terdapat nama-nama seperti *Tuan Guru* Haji Junaidi Rasyidi Ahmad, Lc., dan *Tuan Guru* Haji Mahsup dari Partai Bulan Bintang (PBB), serta *Tuan Guru* Haji Nasruddin dan *Tuan Guru* Haji Musta'rif dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Pada level DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, para calon mencakup Tuan

Guru Haji Drs. M. Syafi'i Ahmad, M.A. (PBB), *Tuan Guru* Haji Bahaudin Nur Badarul Islam (PKB), dan Drs. *Tuan Guru* Haji Abdul Hayyi Nu'man (PBR). Sementara itu, untuk DPR RI, tampil figur seperti *Tuan Guru* Haji Muhammad Zainul Majdi, M.A. (PBB), *Tuan Guru* Haji Muhammad Anwar MZ (PPP), *Tuan Guru* Haji Abdul Rahim Adjrun (PPP), dan *Tuan Guru* Haji Salehuddin, Lc. (PBR). Bahkan, di tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), muncul nama-nama seperti *Tuan Guru* Haji Muslih Ibrahim dan Drs. *Tuan Guru* Haji Munajib, yang semakin mengukuhkan peran keterlibatan *Tuan Guru* sebagai tokoh agama sekaligus pemimpin masyarakat dalam bidang politik pada konteks hari ini.

Keterlibatan *Tuan Guru* dalam politik tentu menjadi diskusi yang cukup menarik. Sebagaimana para ulama hari ini sudah mulai melangkah maju dan menyesuaikan diri dengan zaman dalam konteks dakwah (Aji, 2024). Secara lebih hemat, *Tuan Guru* tidak lagi duduk manis dalam zona nyaman dalam dakwah menyampaikan syariat Islam. Dalam pemahaman mengenai gerakan politik *Tuan Guru*, setidaknya ada beberapa literatur artikel yang menjelaskan mengenai keterlibatan *Tuan Guru* dalam politik di pulau Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Arie Oktara (2015) menemukan bahwa keterlibatan tokoh ulama dalam politik memiliki peran signifikan, secara lebih khusus dalam hal ini keterlibatan *Tuan Guru* di Lombok dalam kontestasi politik memiliki peran penting, secara khusus dimana maraknya eksistensi *Tuan Guru* terlibat politik ketika tokoh muda bernama *Tuan Guru* Bajang memenangkan pemilihan Gubernur 2 periode di daerah NTB (2008-2018).

Kemudian penelitian dilakukan Lavica Anky Riswanda (2022) dan Rahman (2023) memiliki kesamaan penelitian yang dimana menjelaskan bahwa keterlibatan *Tuan Guru* dalam politik bukan keterlibatan instan, perjalanan *Tuan Guru* dalam mengambil peran menjadi aktor politik tidak terlepas dari sejarah perpolitikan bangsa Indonesia, secara khusus transisi politik dari orde baru menuju orde Reformasi yang memberikan akses bebas kepada masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam politik, termasuk tokoh *Tuan Guru* punya akses dan kesempatan menjadi aktor politik. Namun dalam penelitian ini tidak sekedar hanya fokus pemahaman akses positif *Tuan Guru* dalam politik di pulau Lombok, melainkan penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana perjalanan *Tuan Guru* terlibat dalam politik, namun setidaknya-tidaknya *Tuan Guru* sebagai tokoh agamawan mengalami *Dekharismatisasi*. Penelitian ini sebagaimana menegaskan kekuatan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putrawan (2014) menerangkan banyak faktor *Tuan Guru* di Lombok terlibat dalam dunia politik mengalami *Dekharismatisasi* dengan melihat menggunakan kacamata teori kepemimpinan kharismatik dari tokoh sosiolog bernama Max Weber.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan fokus pada studi literatur, yaitu pendekatan penelitian yang mengandalkan data dari berbagai literatur sebagai sumber utama informasi. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan akurat data yang diperoleh dari literatur yang telah dikumpulkan. Menurut Soendari (2012), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam melalui sumber-sumber tertulis yang relevan, tanpa perlu melakukan observasi langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti artikel, buku, jurnal, laporan penelitian, dan informasi yang tersedia secara daring melalui situs web. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan efisien untuk mengakses berbagai referensi yang mendukung topik penelitian, sehingga memperkaya analisis yang dilakukan. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi tiga tahapan utama. *Tahap pertama* adalah pengumpulan data, di mana peneliti mengidentifikasi, memilih, dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian. *Tahap kedua* adalah penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi dalam bentuk yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Data yang telah dikumpulkan diorganisasi, dikelompokkan, dan dijelaskan berdasarkan tema atau kategori tertentu. Dan *tahap*

terakhir adalah proses verifikasi dan penarikan kesimpulan, tahapan ini melibatkan interpretasi dan analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Yusuf, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradoks Dunia Politik

Membahas tentang bagaimana seseorang menemukan pengalaman dan wawasan bersosial, sama dengan menelaah proses berpolitik. Jika setiap detik kehidupan dipandang dengan perspektif politik Maka dirasa perlu lebih dulu mengenali makna politik itu sendiri. Sejarah asal kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota berstatus Negara. Istilah politik diartikan berbagai macam kegiatan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Secara umum politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antara warga Negara dan Negara, maupun hubungan Negara (Fadjar Tri Sakti, 2020). Politik memiliki banyak definisi, makna dan arti. Definisi kata politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) setidaknya memiliki tiga definisi. Pertama adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintah dan dasar pemerintah. Kedua adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintah Negara atau Negara lain. Yang ketiga adalah, cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah) kebijaksanaan (KBBI 2016). Dalam pemahaman umum politik berarti berbagai cara, kegiatan dalam suatu sistem (Negara) yang tersimpul di dalamnya proses yang menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan tersebut. Maka senada dengan pandangan Aristoteles, bahwa pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.

Masuk dalam dunia politik berarti harus mempersiapkan diri dengan semua kemungkinan dan situasi yang ada, dan selalu menekankan diri untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena politik adalah bagian dari usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya manusia ketika itu merasa bahagia dan puas, ini adalah politik (Miriam Budiardjo, 2008). Berpolitik berarti usaha untuk mencapai apa yang dituju, para pengamat setuju bahwa jalan untuk mencapai tujuan tersebut dengan memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu. Jalan ini bisa dilalui dengan menggunakan politik sebagai instrumen penting untuk menggapainya.

Dunia politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencakup berbagai aspek. Seperti kebijakan publik, kekuasaan, pengambilan keputusan. Dunia politik juga memiliki aktor seperti pemerintah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan individu warga masyarakat. Karena semua boleh mengambil andil dalam dunia politik. Dalam konteks Indonesia, dunia politik telah mengalami pasang surut dalam pergolakan dunia politik. Namun telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah reformasi 1998 M. dan semakin berkembang, bahkan sekarang Indonesia memiliki sistem demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang mana semua berhak memilih pemimpin sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada interpretasi serta sistem demokrasi di Indonesia mencakup pembentukan pemerintah serta pengawasan kekuasaan.

Dewasa ini, definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah tersempit oleh definisi lain yang lebih menekankan pada upaya (*means*) untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai dan sebagainya (Miriam Budiardjo, 2008). Di Indonesia sendiri memiliki budaya politik yang melingkupi orientasi individu dan masyarakat yang meliputi sikap serta nilai yang tumbuh kembang di tengah masyarakat terhadap sistem politik. Budaya politik masyarakat tidak sama. Orientasi masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat berkembang dan masyarakat maju (modern). Oleh karena

itu, Almond memilih tiga pola orientasi masyarakat yang berujung pada perbedaan budaya politik. Ketiga pola tersebut yaitu budaya politik parokial, subjek dan partisipan (Haryanto, 2018).

Negara sudah menjamin dan menghormati kebebasan sipil dan politik dengan tujuan untuk menikmati kehidupan pribadi dan publik secara bebas dari intervensi pemerintah atau pihak lain serta memberikan kehidupan yang lebih baik pada masyarakat Indonesia. Namun realitanya, Jika kita melihat indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2020 dan tingkat kemakmuran masyarakat Indonesia saat ini kurang memuaskan. Indonesia saat ini berada di urutan ke-64 dalam indeks Demokrasi 2019 dengan skor kebebasan sipil yang rendah, yakni 5,59. Kalah jauh dari skor kebebasan sipil Timur Leste, 7,56. (Jason Brennan, 2020). Tapi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan sebuah Negara atau pemerintah baik atau tidak baik dan adil hanya dengan tolak ukur indeks kebahagiaan dan pendapatan perkapita warganya. Lebih jauh lagi, penulis ingin memberikan gambaran bahwa pemerintah yang menjamin dan menghargai kebebasan sipil, politik memiliki dampak yang baik bagi keberlangsungan warganya.

Berbicara mengenai politik secara tidak langsung akan berbicara mengenai Negara. Negara menurut definisi yang diberikan oleh Miriam Budiardjo (2008) adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyat. Budiardjo melanjutkan, Para sarjana yang menekankan Negara sebagai inti dari politik (*politics*) memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Dalam suatu Negara ada kekuasaan sebagai pemangku kebijakan dan kekuasaan bagian inti dari politik. Sementara, pandangan Soekarno memaparkan bahwa negara memiliki hakikat sebagai suatu organisasi baik dalam arti *statis* maupun *dinamis* untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan dari pada negara itu sendiri (Yudi Rusfiana, Ismail Nurdin, 2017).

Sebagai Manusia berakal, seringkali dunia politik diwarnai paradoks yang menarik. Di sisi lain, politik harus melayani kepentingan rakyat dan membumikan keadilan sosial. Namun, di satu sisi lain, politik seringkali diwarnai oleh kepentingan pribadi, konflik, dan manipulasi kekuasaan. Hal ini menciptakan ketegangan antara idealisme dan realisme, di mana politisi harus menavigasi antara tujuan mulia dan kenyataan politik yang seringkali kompleks dan berubah-ubah. Karena dalam merajut dunia politik yang baik dibutuhkan banyak negarawan dan politisi yang jujur, baik dan beradab.

Tuan Guru Di Lombok

Tuan Guru adalah gelar keagamaan yang sudah mendarah daging di pulau *Lombok*, panggilan *Tuan Guru* biasanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang sangat luas. Jika diartikan, *Tuan* artinya orang yang sudah menunaikan ibadah Haji dan *Guru* artinya tokoh tempat menimba ilmu agama atau tokoh yang mendakwahkan ajaran agama Islam. *Tuan Guru* adalah tokoh yang berperan aktif dalam memberikan pemahaman keagamaan dan kemasyarakatan. Menurut pandangan Muhammad Sa'i (2022) Para *Tuan Guru* dengan kesungguhannya membangun sebuah budaya dalam bentuk lembaga pendidikan pondok pesantren sebagai sebuah subkultur, dan juga menegaskan tradisi baik dalam masyarakat sebagai perwujudan mengaplikasikan kaidah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang relevan dan lebih baik. Pada umumnya gelar itu diberikan oleh masyarakat kepada mereka yang sudah menunaikan ibadah haji dan memiliki tempat untuk memberikan pengajaran agama Islam. Gelar ini disingkat dengan T.G.H (*Tuan Guru Haji*) (Asnawi, 2005).

Tuan Guru pada etnis Sasak, merupakan salah seorang figur elit, fungsionaris agama Islam yang mempunyai kedudukan terhormat dan menjadi panutan masyarakat dengan kualifikasi sebagai kelompok yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam, mereka diakui sebagai penyebar dan pemelihara ajaran agama Islam, khususnya dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (Fahrurrozi Dahlan, 2015). *Tuan Guru* sosok yang sangat dihormati dan dicintai dikalangan masyarakat suku sasak. *Tuan Guru* merupakan simbol ketakwaan, kesabaran dan kebijaksanaan. Dengan pemahaman agama yang mendalam, perjalanan spiritualitas yang panjang menjadikan *Tuan Guru* di *Lombok* menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat. Dalam pandangan Fahrurrozi Dahlan (2015) *Tuan Guru* mengajarkan nilai-nilai keislaman dengan cara sederhana namun

mendalam. Peran *Tuan Guru* tidak hanya pada peran agama (*sosio organic-religious*) yang mengajarkan dasar-dasar doktrin agama secara tekstual, akan tetapi telah bertransformasi ke ranah pendidikan, sosial, budaya, ekonomi (*sosio-kultural*) dan bahkan telah mengarah ke politik (*sosio-political*).

Melalui bimbingan dan teladannya, *Tuan Guru* membawa perubahan positif dalam masyarakat *Lombok*. *Tuan Guru* mengajarkan pentingnya kejujuran, kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. *Tuan Guru* juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, memenuhi hajat yang membutuhkan, meluangkan banyak waktu untuk kelangsungan umat serta *Tuan Guru* memiliki andil besar dalam mempersatukan *ukhuwah Islamiyah*. Dakwah seharusnya dipahami sebagai suatu upaya transformasi sosial terencana dan terprogram, sehingga perlu ada paradigma baru dalam melihat perkembangan dakwah ke depan, seperti pendekatan transformasi sosial, di samping pendekatan-pendekatan yang lain (S.N. Eisentadr, 1986).

Kepribadian dan ajaran mulia dari para *Tuan Guru* selalu meninggalkan jejak yang selalu terkenang dalam hati masyarakat *Lombok*. *Tuan Guru* dikenal sebagai sosok yang sabar, bijak, dan memiliki kesabaran yang luas, serta selalu menyambut dengan keramahan dan hati yang terbuka dengan tanpa memandang status sosial. Selaras dengan yang disampaikan oleh Salimul Jihad (2021) Saat ini peran tokoh agama atau *Tuan Guru* begitu kuat, sehingga dalam perhelatan pilkada misalnya, para politisi seringkali meminta doa restu dan juga dukungan dari para *Tuan Guru*, bahkan gubernur NTB adalah seorang *Tuan Guru* yang populer dengan sebutan *Tuan Guru Bajang* artinya *Tuan Guru* muda. Dalam perjalanan kehidupan TGH. M. Saleh Hambali (Salah seorang *Tuan Guru* di *Lombok*) misalnya, seperti gambaran yang disampaikan oleh putrinya Hj Fatimatuzzahra, menuturkan sebagai berikut:

“Di rumah dan majelis ini dahulu pernah dengan kegiatan-kegiatan, baik keagamaan, sosial kemasyarakatan, seperti penyantunan anak yatim piatu yang tidak kurang dari 100 orang anak, orang-orang jompo, dan orang-orang miskin, baik yang berasal dari desa Bengkel maupun luarnya, yang diberi makan tiap hari, bahkan tamu-tamu penting, wali murid santri-santri dan jama'ah hamper setiap hari datang mengaji, berziarah dan berkonsultasi kepada datuk baik mengenai agama maupun lainnya. Kesemuanya dilayani oleh beliau dengan baik sehingga tungku pun jarang padam, karena menghormati tamu-tamu tersebut” (Salimul Jihad, 2021).

Berdasarkan uraian diatas TGH.M. Soleh Hambali, membuktikan bahwa tiada hari tanpa melayani dan mengabdikan untuk kelangsungan umat, terkhusus masyarakat *Lombok*. Salimul Jihad melanjutkan. Dalam sisi lain, pendidikan masyarakat *Lombok* juga diawali dengan sistem pendidikan yang bersifat turun-temurun dan sangat tradisional. Seorang dukun mengajari putra-putrinya tentang ilmu-ilmu perdukunan yang dimilikinya, sehingga pada suatu saat putra-putrinya dapat menggantikan profesi orang tuanya. Demikian juga dengan profesi lain seperti petani, nelayan, dan sebagainya dipelajari dari generasi yang lebih tua secara turun temurun. Pentingnya kehadiran *Tuan Guru* dalam tataran sosial keagamaan menambah perspektif baru ditengah-tengah masyarakat. Kehadiran *Tuan Guru* sebagai penerang di tengah masyarakat, *Tuan Guru* mengajak masyarakat untuk bersatu, berbagi dan saling membantu. Kepedulian *Tuan Guru* tidak hanya sebatas kebutuhan spiritual saja tetapi juga pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga kehadiran *Tuan Guru* menjadi katalisator perubahan positif bagi masyarakat *Lombok*.

Tuan Guru di *Lombok* adalah sosok yang sangat dihormati dan dicintai masyarakat. *Tuan Guru* memiliki pengetahuan dan pengalaman agama yang mendalam, mereka mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang sederhana namun mendalam, serta para *Tuan Guru* berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sepak terjang mereka dalam mengabdikan menjadi inspirasi banyak orang. Kehadiran *Tuan Guru* membawa hal positif bagi masyarakat etnis sasak di *Lombok*. Menjadi panutan, dan teladan, serta katalisator perubahan sosial. *Tuan Guru* juga membantu mereka yang kesusahan dibarengi dengan memenuhi hajat masyarakat *Lombok*, lebih-lebih dalam hal agama. Pembelajaran para para *Tuan Guru* akan terus dikenang dan hidup dalam hati masyarakat *Lombok* serta menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

Analisis Dekharismatisasi Tuan Guru dalam Politik

Keterlibatan *Tuan Guru* dalam politik ini memang menurut peneliti Putrawan (2014) membaca dari teori Max Weber dikategorikan sebagai bagian otoritas kharismatik, dimana pada otoritas ini seorang dinilai memiliki kharismatik dengan pendalaman peran dan kepercayaan spiritual. Otoritas kharismatik didasarkan pada keyakinan luar biasa terhadap kualitas pribadi seorang pemimpin, yang dianggap memiliki kemampuan, visi, atau kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam otoritas ini, legitimasi kepemimpinan berasal dari pengakuan dan penghormatan masyarakat terhadap kharisma pemimpin, bukan dari aturan hukum atau tradisi. Pemimpin kharismatik sering kali muncul di masa-masa krisis atau perubahan sosial, di mana orang-orang mencari figur yang mampu memberikan arah dan inspirasi (Ritzer, 2004). Masyarakat melihat sosok *Tuan Guru* ke dalam kategori sosok yang mampu membimbing mereka karena kedalaman ilmu agama islam, sekaligus juga ada hal-hal spiritualitas yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain selain dari *Tuan Guru*.

Selain itu, keterlibatan *Tuan Guru* dalam politik memang disebabkan banyaknya pengikut mereka di setiap desa-desa. Masyarakat melihat *Tuan Guru* sebagai sosok alim, saleh, berkharisma, serta pengetahuan yang luas. Pandangan ini kemudian mengalir kedalam apapun yang diperintahkan oleh *Tuan Guru*, tentu sesuatu yang telah dikelola secara matang-matang, serta itu berpedoman kepada ajaran islam. Sehingga, dari pandangan inilah muncul rasa kepercayaan masyarakat *Lombok* atas *Tuan Guru* masuk dalam dunia politik.

Namun, pada satu sisi, masyarakat *Lombok* merupakan masyarakat tradisional, masyarakat yang memahami bahwa politik merupakan ruang seni yang penuh akan tipu daya. Sebagian Masyarakat *Lombok* tradisional melihat jika seseorang sudah masuk ke dalam dunia politik, maka mereka akan sulit keluar. Dan ketika mereka sudah terlanjur masuk dalam politik dan bahkan menjadi orang-orang penting dalam politik sebagai aktor, maka kemungkinan besar untuk melakukan penyimpangan Sangat besar potensinya.

Ini berlaku juga kepada sosok *Tuan Guru*, walaupun banyak masyarakat *Lombok* memandang *Tuan Guru* sebagai tokoh panutan, tokoh agamawan yang sangat ahli dalam mendakwahi agama. Namun, jika *Tuan Guru* masuk dalam dunia politik, maka ada sebagian masyarakat *Lombok* tentu akan memandang *Tuan Guru* akan ada potensi melakukan pelanggaran, yang sedemikian berlawanan dengan eksistensi mereka sebagai tokoh agamawan yang menyampaikan syiar islam. Pemahaman mengenai *Dekharismatisasi* dapat diletakkan pada konsep pengetahuan yang sering digunakan dalam konteks politik, organisasi, atau kepemimpinan untuk menggambarkan proses penghilangan atau pengurangan pengaruh seorang individu yang memiliki karisma besar, terutama dalam posisi kepemimpinan mengalami kemunduran rasa hormat atas peran identitas yang dimilikinya. Setidaknya terdapat beberapa penyebab *Tuan Guru* ketika masuk dalam dunia politik mengalami Dekhraisatisasi ketokohnya, salah satu penyebab runtuhnya ketokohan *Tuan Guru* ketika masuk dalam politik adalah (Putrawan, 2014);

Pertama Ketika *Tuan Guru* sudah ikut dalam politik, tentu ada kepentingan-kepentingan yang disembunyikan di balik layar, dimana seseorang tidak bisa memahami kepentingan yang dibawa oleh *Tuan Guru* itu benar-benar baik untuk rakyat atau tidak. Aspek pandangan *Tuan Guru* dalam politik bukan soal peran sebagai tokoh agamawan semata, tetapi peran yang dijadikan dirinya ketika masuk dalam dunia politik adalah sebagai dilihat aktor politik yang lebih banyak memanipulasi banyak hal.

Kedua Munculnya *Tuan Guru* sebagai aktor politik tingkat lokal memunculkan pergeseran paradigma dari masyarakat mengenai *Tuan Guru*. Dimana pada masa lalu *Tuan Guru* menjadi sosok pedoman dalam kehidupan, didengarkan, dan dipatuhi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik karena murni pada masa lalu *Tuan Guru* hanya seorang ahli agamawan yang membawa pencerahan bagi umat islam. Namun, setelah adanya pergeseran paradigma secara khusus masa reformasi yang memberikan peluang *Tuan Guru* menjadi aktor politik. Secara nyata juga, *Tuan Guru* banyak menjadi aktor politik, menyebabkan masyarakat tidak lagi berpanduan dalam aspek kehidupan sosial dan politik kepada *Tuan Guru*. Tentu yang dilihat oleh masyarakat *Lombok* adalah peran *Tuan Guru* tidak lagi netral sebagaimana masa lalu, mereka walaupun tokoh agamawan, sudah masuk dalam dunia politik sehingga tidak lagi menjadi rujukan dari pilihan masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka, akibat mulai menurunnya rasa kepercayaan atas *Tuan Guru* dalam

aspek kehidupan sosial politik inilah menimbulkan semakin runtuhnya kharismatik mereka sebagai tokoh agamawan.

Ketiga Era reformasi adalah era dimana kebenaran tidak lagi dipegang oleh sosok otoritas tertentu. Termasuk dalam hal ini aspek keagamaan dan perpolitikan, Putrawan (2014) menjelaskan bagaimana runtuhnya kharisma *Tuan Guru* karena masa reformasi yang membebaskan ruang partisipasi politik terjadinya satu tragedi berupa perselingkuhan *Tuan Guru* dengan para penguasa. Arti perselingkuhan disini adalah bagaimana *Tuan Guru* yang masa lalu sering menjadi penentang pemerintah, namun masa reformasi *Tuan Guru* lebih banyak mengikuti, dan bahkan setuju dengan jalan kebijakan pemerintah. Tentu bukan tanpa sebab dan alasan, perselingkuhan yang terjadi antara *Tuan Guru* dan pemerintah ini disebabkan alasan kepentingan yang menguntungkan satu sama lain. Dalam hal ini, sangat sering terlihat *Tuan Guru* menonjolkan diri mereka berpihak kepada pemerintah, hal ini dibuktikan dengan para *Tuan Guru* membela pemerintah, yang padahal secara jelas melakukan kesalahan. Di titik inilah mulai runtuhnya kharisma dari tokoh agamawan bernama *Tuan Guru* di pulau *Lombok*.

Keempat Faktor lain yang menyebabkan runtuhnya kharisma dan otoritas *Tuan Guru* sebagai tokoh agamawan adalah karena perbedaan afiliasi dengan pengikut. Dimaksudkan dalam hal ini bahwa sejak dulu *Tuan Guru* memang fokus dalam ilmu agama dan menyampaikan kepada umatnya, atau di pondok mereka akan mengajarkan kepada para santri. Dimana masyarakat dan santri yang berguru kepada *Tuan Guru* akan mengamalkan nya, masyarakat maupun santri tentu tidak memiliki pendalaman pengetahuan agama seperti *Tuan Guru*, sehingga mereka yang belajar agama dari berbagai latar belakang, dari petani, buruh, pejabat, penguasa dan bahkan politisi.

Namun hari ini, ketika ada seorang *Tuan Guru* menjadi pejabat publik, lalu kemudian berbeda pandangan dengan pengikutnya yang berasal dari masyarakat maupun santri. Seringkali, terjadinya adu mengadu seperti antara santri dan Masyarakat ikut politik dengan *Tuan Guru* ikut berpolitik saling adu strategi, adu siasat untuk meraih suara. Yang menyebabkan fenomena kompetisi ini memunculkan kesenjangan dalam belajar ilmu agama. Kemudian, akibat dari kompetisi ini pun, muncul pandangan dari masyarakat yang dimana *Tuan Guru* tidak lagi fokus mengajarkan ilmu agama ketika mereka terjun ke dalam dunia politik, karena sibuk mengurus urusan kursi jabatan yang penuh dengan ketidakpastian dan kemungkinan tersebut. Dari sinilah masyarakat *Lombok* melihat *Tuan Guru* semakin jauh dari peran tokoh agamawan sekaligus fenomena *Dekharismatisasi* ketokohan *Tuan Guru* semakin memudar ketika sudah terlanjur masuk dalam dunia politik.

Dalam dunia politik tidak ada dunia suci, yang di dalam dunia politik adalah tentang sejauh mana kepentingan yang harus dijalani. Faktor lain yang menyebabkan runtuh kharisma *Tuan Guru* dalam keterlibatan politik adalah munculnya pragmatisme, dimana posisi ini didapatkan dari seorang pemilih maupun yang dipilih. *Tuan Guru* dalam pandangan masyarakat sudah tidak lagi dipandang seperti dulu lagi, sosok yang memiliki karomah, sangat-sangat didengarkan dan disegani. Ketika *Tuan Guru* masuk dalam dunia politik, muncul ruang pragmatisme dimana ketika *Tuan Guru* maupun masyarakat saling menegosiasikan sebuah istilah tak asing dalam politik, yakni "janji".

Janji adalah sesuatu yang diberikan sebagai harapan untuk diwujudkan oleh seseorang. Posisi ini, *Tuan Guru* dan masyarakat melakukan negosiasi janji untuk harapan *Tuan Guru* bisa dipilih sebagai pemimpin, dan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan mereka sesuai dengan janji-janji yang akan ditepati. Namun menurut Putrawan (2014) sendiri, tercatat bahwa calon yang berasal dari *Tuan Guru* adalah calon yang dikategorikan miskin, dimana hal ini terlihat dari penelitian yang didapatkan bahwa para *Tuan Guru* tidak memainkan politik uang, seperti serangan fajar, sogokan karena dalam pandangan politik *Tuan Guru*, itu merupakan jenis politik yang curang. Masyarakat *Lombok* atau mungkin bahkan masyarakat di seluruh dunia memandang bahwa politik uang di masa kampanye merupakan sesuatu yang biasa. Namun, *Tuan Guru* lebih banyak memainkan peran "janji" Daripada peran "uang dan barang" Pemberian untuk masyarakat. Sehingga disinilah letak dimana masyarakat menilai *Tuan Guru* tidak memiliki modal dalam politik, sekaligus juga banyak pandangan dari masyarakat menilai bahwa sifat Pragmatisme dalam politik memang sesuatu yang wajar. Cuman dalam masyarakat biasa memandang pragmatisme dalam bentuk barang pemberian dan janji, sedangkan *Tuan Guru*

hanya dalam bentuk janji saja, yang mana dalam ruang politik janji seringkali digunakan sebagai modal politik klasik, yang bisa banyak dipastikan sebagai strategi perpolitikan.

Kemudian Faktor terakhir yang menyebabkan runtuhnya kharisma *Tuan Guru* ketika masuk dalam dunia politik ketika para tokoh agamawan mengubah gaya hidup. Dalam hal ini, dimasukkan jika masa lampau *Tuan Guru* hanya fokus kepada hidup kesederhanaan, fokus dalam kajian dakwah keilmuan tanpa menonjolkan hal-hal berbau duniawi. Berbeda dengan hari ini, dimana para tokoh *Tuan Guru* yang terlibat dalam politik mau tidak mau harus menonjolkan diri mereka sebagai orang yang selaras dan menyesuaikan dengan zaman, menggunakan pakaian kekinian, gaya hidup yang menyesuaikan zaman seperti halnya menunjukkan seorang *Tuan Guru* juga bisa bergaya hidup mewah. Namun, dalam pandangan masyarakat *Lombok*, tentu ketika *Tuan Guru* mengubah gaya hidup mereka, itulah yang menyebabkan semakin kurang rasa kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Karena kepercayaan dari masyarakat terhadap *Tuan Guru* dimulai dari bagaimana kehidupan mereka yang sangat sederhana dan sibuk tentang akhir, kemudian berubah menjadi manusia yang FOMO pada soal dunia.

Tentu beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya peran *Tuan Guru* ini merupakan sesuatu hal yang perlu menjadi catatan penting. Apakah Ini merupakan sesuatu yang dikatakan baik atau tidak. Melihat bagaimana keterlibatan *Tuan Guru* dalam dunia politik memang dirasa terbuka kritikan bebas dari masyarakat, jika persoalan siapa yang pantas masuk dalam dunia politik di tengah terbuka lebar dalam hukum negara demokrasi, menghendaki siapapun, maka *Tuan Guru* sebagai tokoh agamawan pun punya hal untuk itu, punya hak untuk menjadi sosok pemimpin politik sekaligus mereka adalah pemimpin politik yang memiliki pengetahuan berdasarkan ajaran agama sebagaimana mereka harus menjadi pemimpin yang baik.

Terdapat untung rugi dari bagaimana fenomena *Tuan Guru* terlibat dalam politik. Untung rugi ini tentu dilihat dalam aspek positif dan dampak negatif *Tuan Guru* tidak bisa fokus dalam menjalankan amanat mereka menjadi tokoh agamawan yang menyebarkan ajaran islam, kemudian munculnya kecenderungan kepentingan politik, kemudian memungkinkan para *Tuan Guru* terjebak dalam politik yang sesat karena dalam politik semua bisa terjebak. Namun dalam sisi positif dalam ditemukan bagaimana menyaksikan siapapun boleh berpolitik, termasuk seorang *Tuan Guru* sekalipun yang dikenal sebagai tokoh agamawan.

Kemudian ketika *Tuan Guru* masuk dalam dunia politik bisa menciptakan kondisi kepemimpinan yang mengandalkan pengetahuan yang mendalam, tentu kebijakan dibuat berdasarkan mementingkan Umat, dan paling penting adanya ruang perbaikan moralitas kepada seorang pemimpin ketika sosok pemimpin adalah para tokoh agamawan yang berkompeten. Jika dipertanyakan apakah benar terjadinya keruntuhan kharisma atau *Dekharismatisasi Tuan Guru* ketika terlibat dalam politik di *Lombok*?, jawabannya tentu iya, dan tak bisa dibantahkan bahwa ketika *Tuan Guru* atau siapapun terlibat dalam dunia politik, secara bulatnya sebut saja dunia kekuasaan. Maka, mereka akan diragukan dan selalu berada posisi di kritisi oleh banyak pihak ketika memang dia tidak bisa memimpin rakyatnya.

KESIMPULAN

Sebagai Manusia berakal, seringkali kita menyaksikan dunia politik diwarnai paradoks yang menarik. Di sisi lain, politik harus melayani kepentingan rakyat dan membumikan keadilan sosial. Namun, di satu sisi lain, politik seringkali diwarnai oleh kepentingan pribadi, konflik, dan manipulasi kekuasaan. Hal ini menciptakan ketegangan antara idealism dan realisme, di mana politisi harus menavigasi antara tujuan mulia dan kenyataan politik yang seringkali kompleks dan berubah-ubah. Karena dalam merajut dunia politik yang baik dibutuhkan banyak negarawan sekaligus politisi yang jujur, baik dan beradab.

Tuan Guru di *Lombok* adalah sosok yang sangat dihormati dan dicintai masyarakat. *Tuan Guru* memiliki pengetahuan dan pengalaman agama yang mendalam, mereka mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang sederhana namun mendalam, serta para *Tuan Guru* berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sepak terjang mereka dalam mengabdikan menjadi inspirasi banyak orang. Kehadiran *Tuan Guru* membawa hal positif bagi masyarakat etnis sasak di *Lombok*. Menjadi panutan, dan teladan, serta

katalisator perubahan sosial. *Tuan Guru* juga membantu mereka yang kesusahan dibarengi dengan memenuhi hajat masyarakat *Lombok*, lebih-lebih dalam hal agama. Pembelajaran para *Tuan Guru* akan terus dikenang dan hidup dalam hati masyarakat *Lombok* serta menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.

Keterlibatan *Tuan Guru* dalam dunia politik memang menjadi satu diskursus panjang yang selalu hangat untuk jadi wacana akademik, sebagaimana wacana tentang keterlibatan ulama di Indonesia dalam dunia politik. Tentu terdapat pro dan kontra di dalam argumen mendukung maupun mengkritik satu sama lain. Dalam artikel ini peneliti melihat dalam kajian deskriptif literatur secara khusus hasil penelitian dari Putrawan (2014) dalam pembacaan mengenai keterlibatan *Tuan Guru* dalam politik ternyata mengalaminya *Dekharismatisasi* akan dirinya sebagai tokoh agamawan. Sebagaimana menggunakan teori dari Max Weber mengenai otoritas kharismatik yang memberikan argumen bahwa seorang tokoh terlibat dalam politik pada masyarakat melihat dalam tatanan keyakinan luar biasa terhadap kualitas pribadi seorang yang dianggap memiliki kemampuan, visi, atau kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sosok *Tuan Guru* dilihat dalam perspektif Tokoh agamawan yang mampu menjalankan peran dakwah dalam mengajarkan ajaran Islam. Namun, dalam keterlibatan politik, penelitian Putrawan didapatkan *Tuan Guru* mengalami *Dekharismatisasi* dikarenakan banyak faktor-faktor yang menyebabkan menurun kharisma mereka, baik dari faktor eksternal maupun internal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, W. T. (2024). Etika Politik Franz Magnis Suseno. Ypad Penerbit.
- [2] Aji, W. T. (2024). Relasi Gerakan Sosial Politik Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Assulamy Desa Langko Kecamatan Lingsar KABUPATEN LOMBOK (BARAT)). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 111-121.
- [3] Aji, W. T., & Ansori, Z. (2024). Etika Politik Islam Ali Syari'ati.
- [4] Asnawi (2005), *Kematian Bayi Antara Takdir dan Kesalahan Pola Asuh: Menyikapi Pola Perawatan Bayi di Lombok Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Pustaka Irfani)
- [5] Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama.
- [6] Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 3(1), 251-270.
- [7] Djuyandi, Y. (2023). Pengantar ilmu politik. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- [8] Fadjar Tri Sakti (2020), *Pengantar Ilmu Politik* (Penerbit: Jurusan Administrasi public Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- [9] Fahrurrozi Dahlan (2015), *Tuan Guru Eksi tensi dan Tantangan Peran Dalam Transformasi Masyarakat* (Jakarta, Sanabil)
- [10] Fahrurrozi. (2018). *Tuan Guru and social change in Lombok, Indonesia*. *Indonesia and the Malay World*, 46(135), 117-134.
- [11] Hamid, I., Aji, W. T., & Aprilia, L. (2024). Peran *Tuan Guru* sebagai Opinion Leader dalam Pilihan Politik Masyarakat Dusun Kapek, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari.
- [12] Haryanto (2018), *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal* (Penerbit: PolGov)
- [13] Huda, S. (2021). Ulama Pewaris Para Nabi: Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(2), 155-171.
- [14] Jason Brennar, (2020) *Filsafat Politik* (Penerbit: Frierich Naumann Foundation Indonesia).
- [15] Mariam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama).
- [16] Muhammad Sa'i, Adi Fadli (2022), *Tuan Guru Lombok Jaringan dan Peran dalam Membumikan Al-Qur'an*, (Penerbit: UIN Mataram Press).
- [17] Muhtador, M., Said, M., & Adlina, A. U. (2023). Religion and Authority: The Role of *Tuan Guru* in Shaping the Islamic Discourse of Sasak Community in *Lombok*, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 31(1).

- [18] Nasution, M. A., Hutagalung, M. W. R., & Lubis, M. A. (2023). MASYARAKAT ACEH, LOMBOK, DAN SUMATERA BARAT Tinjauan Kearifan Lokal dan Peraturan Daerah Syariah.
- [19] Oktara, A. (2015). Politik *Tuan Guru* di Nusa Tenggara Barat. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 73-82.
- [20] Paisal, J. (2021). Peran Ulama dalam Masyarakat Aceh dari Masa Kemasa. At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, 89-104.
- [21] Putrawan, A. D. (2014). Dekarismatisasi *Tuan Guru* Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 5(2).
- [22] Rahman, L. M. F. (2023). Transformasi Sosial Politik Kaum Santri Di Lombok. Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir, 5(1), 123-169.
- [23] Riskia, M. (2022). Implementation Of Mudharabah Financing On Baitul Maal According Majelis Ulama Indonesia. Journal of Nusantara Economy, 1(1), 1-13.
- [24] Riswanda, L. A. (2022). Pergeseran Peran *Tuan Guru* Dalam Kontestasi Politik Lokal Di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Mengkaji Indonesia, 1(1), 51-66.
- [25] Ritzer, G. (2004). Teori sosiologi modern.
- [26] S. N. Eisenstadr (1986), *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, penerj. Chandra Johan (Jakarta: Rajawali)
- [27] Salimul Jihad (2021) *Polarisasi Pemikiran Tuan Guru Dan Tradisi Adat Pewarisan Sasak di Lombok* (Penerbit: Sanabila)
- [28] Samudra Biru.
- [29] Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17, 75.
- [30] Surbakti, R. (1992). Memahami ilmu politik. Grasindo.
- [31] Wulandari, U., & Hudaidah, H. (2021). Peranan Ulama dalam Islamisasi di Sumatera Selatan. Danadyaksa Historica, 1(1), 34-47.
- [32] Yudi Rusfiana, Ismail Nurdin (2017), *Dinamika Politik Kontemporer* (Penerbit: ALFABETA,cv).
- [33] Yusuf, A. M. (2005). Metodologi penelitian. Padang. Padang: UNP Pers.